

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan disesuaikan dengan zaman yang kian modernisasi karena hasil pemikiran dan karya cipta dari manusia itu sendiri sehingga kita sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Bangsa yang ingin maju, membangun, dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakatnya tentu mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa karena pendidikan merupakan wujud kegiatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat agar dapat bersaing secara sehat dengan prinsip untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk kualitas suatu bangsa dan kemajuan negara yang disertai dengan keimanan dan ketakwaan agar dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak suatu bangsa. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan membentuk watak suatu bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka dalam proses pembelajaran hendaklah kita mengukur kadar ketercapaian kurikulum di jenjang sekolah, khususnya yang mencakup tujuan dan isi melalui suatu penilaian

terhadap pencapaian hasil pembelajaran. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik apakah sudah memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau belum sesuai dengan standar nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang sering dianggap sebagai salah satu dari tiga pilar utama yang sangat menentukan kegiatan pembelajaran. Ketiga pilar tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Apabila ketiga pilar tersebut sinergis dan berkesinambungan, maka akan sangat menentukan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sistem penilaian harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan strategi dan model pembelajaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disebutkan:

Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Dengan demikian, adanya penilaian dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, guru dan peserta didik memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa yang dilakukannya dalam pembelajaran.

Dengan menelaah pencapaian tujuan pembelajaran melalui penilaian, guru dapat mengetahui apakah proses belajar yang dilakukan cukup efektif

memberikan hasil yang baik dan memuaskan atau sebaliknya kepada peserta didik. Sebagai penilai hasil belajar peserta didik, guru hendaknya terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui penilaian ini merupakan umpan balik (*feed back*) terhadap proses pembelajaran. Umpan balik ini akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian, proses pembelajaran akan terus dapat ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dalam hal ini, penilaian yang akan dikaji berkenaan dengan penilaian sikap di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK (Sugiantini, 31, hlm. 2007) merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, dan mengembangkan diri di kemudian hari. Oleh karena itu, SMK mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan peserta didik sebagai tenaga muda terampil yang siap memasuki dunia kerja yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kualitas lulusan SMK tidak hanya ditentukan oleh keahlian yang dimiliki oleh setiap peserta didik berdasarkan program keahliannya masing-masing, tetapi juga harus didukung oleh keterampilan sosial yang dimiliki oleh setiap lulusan, seperti sikap dan perilaku.

Sikap dapat menentukan keberhasilan seorang peserta didik dalam mencapai ketuntasan belajar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan kompetensi lulusan untuk tingkat SMK dalam ranah sikap, sebagai berikut:

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Untuk mencapai kompetensi lulusan tersebut perlu ditetapkan standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan kompetensi inti untuk tingkat SMK kelas X-XI dalam ranah sikap, sebagai berikut:

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Semua guru harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam merancang program pembelajaran, satuan pendidikan harus memperhatikan ranah afektif. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dalam merancang program pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, guru harus memperhatikan karakteristik afektif peserta didik melalui penilaian sikap.

Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Dalam penilaian sikap, objek sikap yang dapat dinilai dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Winarno, 2013, hlm. 222), sebagai berikut:

1. Sikap terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan.
2. Sikap terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Sehingga akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.
3. Sikap terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman, dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.

Penilaian sikap sangat penting dalam proses pembelajaran, namun dalam kenyataannya penilaian sikap kurang dilaksanakan oleh para guru. Sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chotimah (2010, hlm. 2) ditemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP diketahui pada umumnya mereka menilai hasil belajar peserta didik dengan menggunakan tes dan lebih menekankan pada aspek penguasaan pengetahuan (aspek kognitif) yang menekankan pada aspek pengulangan materi dengan cara mengingat/menghafal sejumlah konsep, walaupun sesungguhnya mereka menyadari bahwa untuk menilai aspek afektif dan psikomotor tidaklah relevan jika hanya menggunakan tes. Hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa mereka menyadari betul sesungguhnya masalah afektif dirasakan sangat penting. Akan tetapi, kenyataannya dapat dikatakan hampir sebagian besar guru tidak menilai domain afektif, yang ada hanyalah penilaian yang dilakukan tanpa acuan yang jelas dan dianggap sudah menilai secara tidak terstruktur dan terencana. Pada mata pelajaran tertentu kadang penilaian afektif dilaksanakan pada akhir pelajaran maupun ada juga pada saat proses belajar mengajar berlangsung, tetapi kebanyakan guru tidak melaksanakan penilaian afektif pada saat proses belajar mengajar.

Keadaan tersebut sejalan dengan hasil temuan Hasan (2010, hlm. 3), yang mengungkapkan bahwa penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada setiap materi pokok hanya diorientasikan pada aspek kognitif dengan taksonomi tingkat rendah, yaitu melalui tugas-tugas Lembar Kerja Siswa (LKS), ulangan harian, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Hal ini berakibat pada pencapaian aspek kompetensi afektif dan psikomotor tidak maksimal sehingga untuk mengukur pencapaian peserta didik pada kompetensi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pada umumnya guru menggunakan instrumen penilaian yang lebih menekankan pada aspek kognitif. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai konsep-konsep tertentu tanpa disertai tagihan lain yang lebih komprehensif.

Penilaian pembelajaran lebih ditekankan pada hasil yang cenderung hanya menilai kemampuan aspek kognitif. Sementara, penilaian dalam aspek afektif dan psikomotor kerap kali diabaikan dan belum terealisasikan dengan baik.

Akibatnya rendahnya kualitas sopan santun dan tanggung jawab peserta didik karena penilaian yang dilakukan umumnya terfokus pada kegiatan yang menyangkut prestasi akademik sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah banyak yang dilingkupi oleh persoalan rendahnya kualitas sikap yang baik.

Pencapaian kompetensi afektif serta penilaiannya kurang mendapat perhatian semestinya dalam sistem pendidikan di Indonesia selama ini. Hal-hal yang bersikap afektif yang berkaitan dengan emosi, olah rasa, sikap bahkan moralitas, tampaknya dianggap tidak memiliki relevansi langsung dengan tuntutan zaman. Akibatnya, tidak mengherankan jika potret lulusan sekolah tidak jarang menampilkan sisi buram dalam aspek afektif, seperti lemahnya sopan santun dan budi pekerti, kurang disiplin, terjadinya perkelahian (tawuran) antarpelajar, merebaknya kenakalan dan tindak kriminal, kurang tumbuhnya rasa kemanusiaan dan empati, melemahnya semangat kebangsaan, renggangnya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Anwar (1997) tentang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan bahwa:

Pola mengajar yang dilakukan guru lebih bersifat pemberian pengetahuan, disamping suasana dan situasi pengajaran kurang mengarah pada pembentukan sikap peserta didik. Guru belum membina sikap dan perilaku peserta didik secara nyata. Pada kenyataan ini diberitakan sering terjadinya perkelahian (tawuran) antarpelajar yang membawa korban jiwa dan kurangnya disiplin terhadap peraturan lalu lintas, walaupun pada hakikatnya banyak faktor yang mempengaruhi perilaku peserta didik (keluarga, masyarakat maupun sekolah). Oleh karena itu, paling tidak Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk lebih berperan dalam membentuk perilaku peserta didik.

Berdasarkan penelitian Santrock (dalam Muchtar, 2010, hlm. 71), kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa sistem penilaian yang dilakukan baik oleh guru, sekolah dan bahkan oleh pemerintah tetap menggunakan penilaian tradisional, yaitu memberikan sejumlah soal dengan jawaban pendek, isian atau pertanyaan pilihan ganda dan menilai sejumlah tugas terbatas yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini juga cenderung hanya mengungkap aspek kognitif, bahkan kognitif tingkat rendah, yaitu aspek ingatan dan pemahaman. Kecenderungan pelaksanaan penilaian tradisional ini pada dasarnya terlalu menyederhanakan kapasitas peserta

didik selaku pembelajar karena potensi-potensi yang dikembangkan dan hasil belajarnya tidak sepenuhnya diungkap, apalagi jika penilaian hanya terbatas pada pengungkapan kemampuan kognitif aspek ingatan dan pemahaman yang hanya mengandalkan memori semata.

Selain itu, penelitian yang ditemukan oleh Muchtar (2010, hlm. 72) menyatakan bahwa kecenderungan penerapan penilaian tradisional yang hanya mengukur prestasi akademik kemampuan kognitif peserta didik, seperti dalam penilaian tradisional berdampak luas terhadap seluruh aktivitas pembelajaran. Hal ini telah mendorong pengelola sekolah untuk mengejar prestasi itu melalui berbagai cara. Sekolah cenderung memacu kemampuan kognitif peserta didik dengan memberikan pelajaran tambahan dan menggunakan metode *drill* dalam setiap pembelajarannya agar peserta didiknya memperoleh nilai tinggi pada mata pelajaran yang diujiannasionalkan.

Masalah-masalah semacam itulah yang dialami dalam penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dimana penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih banyak menilai aspek kognitif. Jadi, seandainya peserta didik berhasil baik dalam tes kognitifnya berarti mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, hal itu tidak menjamin bahwa peserta didik itu mempunyai penghayatan yang baik dan dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan yang sejalan dengan apa yang telah diketahuinya itu.

Permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah juga kebanyakan kurang mendapat perhatian dari peserta didik, bahkan sering dianggap mata pelajaran yang kurang menarik karena kebanyakan guru Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan penilaiannya pada aspek kognitif. Peserta didik secara terus menerus diberikan stimulus (rangsangan) berupa materi dengan cara menghafal atau mengingat konsep yang telah dibahas yang bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan menguasai materi tersebut. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Danial (2009, hlm. 2) terhadap peserta didik SMA Kota Bandung tentang pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah menunjukkan hal-hal

yang kurang menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat pada data-data berikut ini:

| Pernyataan | Persentase |
|---|---|
| 1. Pembelajaran PKn penting. | a. Sangat penting (52,22%) b. Penting (47,78%) |
| 2. Pembelajaran PKn dapat dipahami. | 46,11% |
| 3. Konsep yang paling menarik dari PKn. | a. Ilmu Politik dan Pemerintahan (27,22%) b. Hukum dan Keadilan (37,78%) c. Demokrasi dan HAM (31,11%) d. Warga Negara dan Negara (11,67%) |
| 4. Guru PKn menarik ketika mengajar | a. Sangat menarik (29,44%) b. Menarik (55,00%) |
| 5. Guru PKn menguasai materi pelajaran. | 33,33% |
| 6. Guru PKn menggunakan alat peraga. | a. Gambar (40,55%) b. Bagan (26,67%) |

Sumber: Danial (2009, hlm. 2)

Pada tingkat SMK, peserta didik lebih terfokus dan lebih mementingkan pelajaran produktif yang merupakan pelajaran keahlian. Mereka tidak menyadari pentingnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk peningkatan kualitas dirinya di masa yang akan datang. Padahal menurut Kosasih Djahiri (dalam Winarno, 2013, hlm. 71) bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang secara programatik prosedural berupaya memanusiakan (*humanizing*) dan membudayakan (*culturing*) serta memberdayakan (*empowering*) peserta didik (diri dan lingkungannya) agar menjadi warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, agar peserta didik menjadi warga negara yang baik, maka penilaian dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup ketiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Budimansyah (2009) bahwa kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun atas dasar, sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan

terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang didasarkan pada nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kepribadian dan pedoman perilaku masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan menggunakan penilaian tersebut, maka akan meningkatkan watak kewarganegaraan yang merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang meliputi sikap dan tingkah laku seseorang sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialaminya, seperti jujur, tanggung jawab, disiplin diri, kepedulian, kesopanan, kerjasama, rasa ingin tahu, kemauan untuk mendengar, dan bentuk sikap lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Torney Purta dan Vermeer (dalam Winarno, 2013, hlm. 176) bahwa "*Civic dispositions (motivations for behavior and values/attitudes), such as support for justice and equality and a sense of personal responsibility*". Pernyataan tersebut dapat diartikan watak kewarganegaraan meliputi motivasi untuk memiliki nilai maupun tingkah laku serta memiliki rasa tanggung jawab diri.

Dengan demikian, watak kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut sesuai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk karakter warga negara yang baik. Sebagaimana yang dirumuskan dalam *Center for Indonesian Civic Education* (dalam Winataputra, 2007) bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, Dasim Budimansyah (dalam Hasan, 2010, hlm. 6) mengemukakan bahwa penilaian yang digunakan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus menerapkan prinsip penilaian proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan penilaian proses adalah mencari umpan balik (*feedback*) untuk memperbaiki pembelajaran yang sedang berlangsung. Penilaian hasil dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai

penguasaan atau pencapaian hasil belajar peserta didik terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu.

Penilaian dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kekhasan berkenaan dengan karakteristik bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan adalah “*value based education*” (Daryono, 2008, hlm. 13), yaitu pendidikan berbasis nilai, artinya suatu usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didik sehingga peserta didik bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mengembangkan misi sebagai pendidikan nilai atau pendidikan karakter warga negara. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan karakter warga negara ideal, yaitu warga negara yang memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokratis bertanggung jawab.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang menekankan pada sikap dan kepribadian sehingga penilaian sikap lebih diutamakan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disebutkan tujuan penilaian adalah:

Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan.

Oleh karena itu, penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan pada penilaian kepribadian yang dilakukan dengan cara mengamati perubahan tingkah laku dan sikap guna menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan penilaian tersebut, maka diharapkan adanya penilaian sikap dapat mengukur kemampuan afektif peserta didik agar peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai moral yang terdapat pada dirinya sehingga selalu mengaplikasikan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha mengungkapkan tentang penilaian sikap dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka peneliti mencoba untuk mengetahui jawabannya melalui suatu penelitian yang berjudul “Implementasi Penilaian Sikap Dalam Meningkatkan Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitis di SMK Negeri 1 Katapang)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memberikan rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu tentang “bagaimana penilaian sikap dalam meningkatkan watak kewarganegaraan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang?”

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian serta agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana teknik penilaian sikap yang digunakan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang?
2. Bagaimana tingkatan ranah sikap peserta didik dalam meningkatkan watak kewarganegaraan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang?
3. Bagaimana pelaksanaan penggunaan penilaian sikap dalam meningkatkan watak kewarganegaraan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang?
4. Bagaimana dampak penerapan penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penilaian sikap dalam meningkatkan watak kewarganegaraan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Menganalisis teknik penilaian sikap yang digunakan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang.
- b. Menganalisis tingkatan ranah sikap peserta didik dalam meningkatkan watak kewarganegaraan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang.
- c. Menganalisis pelaksanaan penggunaan penilaian sikap dalam meningkatkan watak kewarganegaraan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang.
- d. Menganalisis dampak penerapan penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi dan data mengenai penilaian sikap dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Katapang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru, khususnya dalam penilaian sikap yang dapat mengukur kemampuan afektif peserta didik untuk meningkatkan watak kewarganegaraan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peserta Didik

- 1) Sebagai umpan balik untuk mengetahui seberapa jauh keefektifan penilaian sikap dalam mengubah tingkah laku peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Menumbuhkan rasa percaya diri karena peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri sehingga dapat mengintrospeksi diri serta mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri.

- 3) Sebagai motivasi untuk berbuat jujur dan objektif dalam menyikapi suatu hal. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral.

b. Bagi Guru

- 1) Dapat mengetahui kecenderungan sikap yang dimiliki oleh peserta didiknya agar tahu bagaimana ia harus bersikap dan mampu meneliti perubahan sikap yang terjadi sebagai hasil dari proses belajar yang dialami oleh peserta didik sesuai dengan tujuan instruksional pendidikan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Dalam menilai proses dan hasil belajar peserta didik, guru tidak hanya menilai aspek kognitif dan psikomotor saja, tetapi lebih terfokus menilai aspek afektif sehingga pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan lebih menarik dipandang oleh peserta didik karena tidak hanya menghafal/mengingat konsep materi Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi lebih berkenaan bagaimana peserta didik dapat bertanggung jawab dan konsisten apa yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.
- 3) Sebagai acuan dalam menilai peserta didik secara objektif sehingga dapat menghindari penilaian secara subjektif agar dapat diperoleh penilaian sesuai kondisi dan fakta yang ada serta sesuai sikap peserta didik.

c. Bagi Sekolah

Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah melalui pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif (sikap) peserta didik dengan menggunakan penilaian sikap dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, dapat mendukung tingkat keberhasilan peserta didik yang tidak dipandang dari segi kognitif (pengetahuan) saja, tetapi dari segi afektif (sikap) harus lebih diutamakan.

E. Struktur Organisasi Tesis

Bab I menyajikan pendahuluan yang menjadi konteks munculnya masalah yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II menyajikan kajian pustaka, penelitian terdahulu yang relevan, dan paradigma penelitian. Kajian pustaka berisi deskripsi, analisis konsep, dan teori-teori yang mendukung dalam penelitian yang dikaji tentang Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, watak kewarganegaraan, sikap, dan penilaian sikap. Penelitian terdahulu yang relevan berisi penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang penelitiannya berkaitan dengan penilaian sikap, watak kewarganegaraan, dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma penelitian berisi pandangan peneliti terhadap penelitian yang dilakukan tentang implementasi penilaian sikap dalam meningkatkan watak kewarganegaraan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Bab III menyajikan metode penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik triangulasi data.

Bab IV menyajikan temuan dan pembahasan yang terdiri atas deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data temuan hasil penelitian, dan pembahasan temuan hasil penelitian.

Bab V menyajikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan berisi uraian singkat mengenai hasil penelitian dalam bentuk rekonseptualisasi peneliti, implikasi berupa dampak hasil penelitian, dan rekomendasi berupa saran atau masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji maupun kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.